

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Partisipasi dalam proses kebijakan publik merupakan aspek yang krusial dan fundamental. Partisipasi menjadi aspek krusial dalam memastikan kebijakan publik sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan harapan masyarakat (Rian N. D. dalam Mansur, 2021: 332). Partisipasi juga menjadi aspek fundamental dalam menopang implementasi, melaksanakan evaluasi serta mengoptimalkan manfaat kebijakan publik. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat menjadi aspek yang krusial dan fundamental untuk memastikan kebijakan publik sesuai dan dapat diterapkan secara optimal di berbagai sektor kehidupan, khususnya dalam sektor pariwisata.

Sektor pariwisata membutuhkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan, tantangan dan mengembangkan potensi pariwisata yang salah satu realisasinya melalui kebijakan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Permasalahan yang terkait dengan kebijakan pengembangan DPSP adalah terkonsentrasinya kunjungan wisatawan mancanegara di pulau Bali serta kurang tergalinya destinasi pariwisata potensial lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen dalam mengembangkan 5 (lima) DPSP untuk mengatasi permasalahan, tantangan, mengembangkan potensi pariwisata serta memfokuskan program *The New Bali Project* atau program 10 (sepuluh) Destinasi Wisata Prioritas yang telah dicanangkan sebelumnya. Adapun, kelima DPSP tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang (Saragih *et al.*, 2021: 38).

Kebijakan pengembangan kelima DPSP tersebut memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan visi pembangunan nasional. Visi tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Berdasarkan regulasi tersebut, visi pembangunan kepariwisataan nasional di Indonesia adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, visi pembangunan nasional tersebut menjadi arah kebijakan pengembangan kelima DPSP tersebut, khususnya DPSP Borobudur.

Pengembangan DPSP Borobudur didorong oleh berbagai permasalahan mengenai kepentingan konservasi dan pengembangan industri pariwisata. Status Candi Borobudur sebagai Warisan Budaya Dunia menjadi sarana pemasaran yang efektif dalam pengembangan industri pariwisata, tetapi dapat menyebabkan kemerosotan dan kerusakan budaya atau lingkungan (Yang & Lin dalam Darmawan, 2022: 22). Hal tersebut terbukti dari penurunan pengaruh Candi Borobudur di dunia internasional karena pemanfaatan ekonomi yang lebih dominan daripada konservasi. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan antara kepentingan konservasi dengan pengembangan industri pariwisata di Candi Borobudur. Harapan tersebut diupayakan melalui penataan kawasan yang sesuai dengan regulasi terkait pembagian Kawasan Borobudur.

Pembagian Kawasan Borobudur dan sekitarnya atau Kawasan Borobudur diatur dalam berbagai regulasi, yaitu *Master Plan* Borobudur Tahun 1979 oleh JICA (*Japan International Cooperation Agency*), Keputusan Presiden Nomor 1

Tahun 1992, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2024. Pembagian Kawasan Borobudur sebelum diterapkannya Perpres Nomor 58 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 101 Tahun 2024 sering kali menimbulkan kebingungan bagi pengelola dan masyarakat dalam menentukan regulasi yang paling tepat untuk diterapkan. Penggunaan Keppres Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya tidak sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari peruntukan Zona 2 dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1992 yang digunakan untuk pembangunan taman wisata sebagai tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan dan pelestarian lingkungan candi. Hal tersebut berbeda dengan peruntukan Zona 2 dalam PP Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Dalam regulasi tersebut, Zona 2 digunakan sebagai lahan di sekitar situs yang menjadi penyangga bagi kelestarian situs. Adapun, *Master Plan* Borobudur Tahun 1979 oleh JICA yang digunakan pemerintah juga bukan dokumen berkekuatan hukum (Darmawan, 2022: 24). Pada akhirnya, kebingungan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian fungsi Zona 1 dan Zona 2 yang seharusnya dipergunakan untuk konservasi, pariwisata dan pendidikan menjadi area komersial untuk kegiatan usaha pedagang kecil.

Keberadaan pedagang kecil yang selama ini menempati Zona 2 menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi kepentingan. Pada satu sisi, pedagang kecil menjadikan Zona 2 sebagai sumber penghidupannya karena pedagang kecil sendiri

adalah pedagang yang hanya berjualan dengan keuntungan yang minim dan digunakan untuk bertahan hidup (Halpiah *et al.*, 2021: 140). Adapun, jika ditinjau dari sisi kepentingan konservasi, Zona 2 merupakan area yang seharusnya tidak dipergunakan untuk kegiatan usaha pedagang kecil.

Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan solusi yang mencakup penataan pedagang kecil di Zona 2 dan mengembalikan fungsi Zona 2 sebagai area penyangga kelestarian candi. Penataan pedagang kecil di Zona 2 merupakan solusi dari minimnya regulasi tentang penataan UMKM lokal di Kawasan Borobudur (Darmawan, 2022: 26). Sedangkan, pengembalian fungsi Zona 2 bertujuan untuk menurunkan persentase Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di area sekitar Candi Borobudur yang sebelumnya hampir menyentuh angka 13 persen menjadi di bawah 4 persen agar sesuai dengan rekomendasi UNESCO (Naila Nihayah, 2024). Berbagai solusi tersebut diwujudkan melalui pembangunan Kampung Seni Borobudur yang meliputi pemindahan kegiatan usaha pedagang kecil dari Zona 2 menuju Zona 3 di lapangan Kujon.

Kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur tidak hanya bertujuan untuk menata pedagang kecil dari Zona 2 menuju Zona 3, tetapi juga untuk meningkatkan fungsi pemanfaatan ekonomi dan seni di Candi Borobudur. Hal tersebut dapat diketahui dari fungsi Kampung Seni Borobudur sebagai area *drop off*, area parkir, area berdagang serta ditunjang dengan fasilitas *open stage* dan *amphitheatre* (Kurniawati, 2020). Pada intinya, Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi Zona 2, memanfaatkan potensi ekonomi serta mendukung konsep pariwisata berkelanjutan di Kawasan Borobudur.

Kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur yang memiliki tujuan yang solutif dan konstruktif, pada kenyataannya terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan implementasinya. Kesenjangan tersebut dapat diketahui dari belum adanya kepastian jaminan lokasi usaha di Kampung Seni Borobudur, adanya sebagian pedagang kecil yang belum mendapatkan hak atas lapak sementara serta keengganan pedagang kecil untuk direlokasi karena faktor kenyamanan, lokasi yang kurang strategis dan kekhawatiran mengenai hilangnya pelanggan (Afrizal & Dewi, 2021: 290). Kesenjangan lain yang terjadi adalah ketidakpuasan dari sebagian pedagang kecil mengenai ketidakjelasan regulasi serta ketidaksesuaian spesifikasi bangunan dengan rencana pembangunan. Berbagai kesenjangan tersebut mengindikasikan adanya permasalahan terkait partisipasi pedagang kecil dalam kebijakan tersebut.

Indikasi tersebut mengarah pada kurangnya partisipasi pedagang kecil yang dapat menyebabkan kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur tidak berjalan dengan optimal. Hal ini telah dibuktikan pada penelitian Arrahmah & Wicaksono (2022) serta Heremba *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa kebijakan tidak dapat berjalan optimal jika minim partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Rosiana (2017) juga menunjukkan hal yang serupa, yaitu partisipasi berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Adapun, menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Nelly (2024), realisasi kebijakan yang tidak optimal atau tidak berhasil dapat dipengaruhi oleh partisipasi dalam suatu kebijakan yang merupakan fenomena yang dinamis, bervariasi, dan kompleks.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dapat menentukan kualitas kebijakan melalui fenomena yang dinamis, bervariasi, kompleks. Menurut Sinambela (dalam Rahayu *et al.*, 2024: 740), pengelolaan kebijakan yang berkualitas dipengaruhi oleh tingginya partisipasi publik. Adapun, tinggi rendahnya partisipasi publik dapat berjalan secara dinamis atau berubah sesuai dengan situasi, kondisi dan faktor tertentu. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa partisipasi publik juga merupakan hal yang kompleks dan variatif. Pada dasarnya, partisipasi publik yang dinamis, kompleks, dan variatif menunjukkan terjadinya dinamika partisipasi dalam proses kebijakan publik, khususnya kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur. Oleh karena itu, tinjauan dari berbagai perspektif sangat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih obyektif mengenai dinamika partisipasi pedagang.

Berdasarkan perspektif pengelola Kawasan Borobudur, proses kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur telah memenuhi prinsip partisipatif. PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC) atau disebut juga dengan *InJourney Destination Management* (IDM) telah berupaya untuk melibatkan berbagai *stakeholder* dalam proses kebijakan tersebut, termasuk perwakilan pelaku usaha atau pedagang. Upaya pelibatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak serta menata dan membangun Kampung Seni Borobudur sebagai pusat pengembangan dan ruang ekspresi budaya lokal, ekonomi kreatif serta UMKM lokal (Dina T Wijaya, 2024).

Upaya PT TWC/IDM untuk melibatkan berbagai *stakeholder* dalam kebijakan tersebut pada kenyataannya tidak berjalan optimal. Pada pelaksanaannya,

mayoritas pedagang kecil kurang diberikan ruang partisipasi dalam penetapan relokasi sehingga kebijakan tersebut terkesan dipercepat dengan perencanaan yang minim. Sebagian pedagang kecil juga merasakan ketidakadilan dan kurangnya transparansi dalam setiap tahapan kebijakan tersebut. Selain itu, para pedagang kecil yang tergabung dalam Kelompok Pedagang Sentra Kerajinan dan Makanan Borobudur mendesak pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan melibatkan pedagang dalam setiap proses pengambilan keputusan serta memastikan seluruh pedagang mendapatkan perlakuan yang adil (Dina T Wijaya, 2024).

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui dinamika partisipasi pedagang kecil dalam proses kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika partisipasi pedagang kecil dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut dalam proses kebijakan Pembangunan Kampung Seni Borobudur. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan responden. Responden dalam penelitian ini terdiri dari pedagang kecil sebagai subjek utama serta subjek pendukung yang meliputi PT TWC/IDM, Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, Pemerintah Kecamatan Borobudur serta Pemerintah Desa Borobudur. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dinamika partisipasi dalam kebijakan tersebut serta sebagai rekomendasi perbaikan kebijakan serupa di masa mendatang.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana dinamika partisipasi pedagang kecil di Kampung Seni Borobudur dalam proses kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Untuk menganalisis dinamika partisipasi pedagang kecil dalam proses kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur;
- 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika partisipasi pedagang kecil di Kampung Seni Borobudur;

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang berjudul Dinamika Partisipasi Pedagang dalam Kebijakan Pembangunan Kampung Seni Borobudur diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan teoritis merupakan kegunaan yang berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengembangan teori, ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu yang diteliti, sedangkan kegunaan praktis merupakan kegunaan yang dapat diimplementasikan untuk memecahkan suatu permasalahan secara praktis atau sebagai alternatif solusi. Adapun, kegunaan-kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:



#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis. Manfaat-manfaat ini meliputi penambahan referensi, literatur, wawasan pengetahuan serta perkembangan akademis dalam ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya tentang dinamika partisipasi pedagang dalam suatu kebijakan publik.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti mengenai dinamika partisipasi pedagang dalam kebijakan publik. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian dengan topik serupa dikemudian hari.

##### **b. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan dan menyusun kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memahami dinamika partisipasi pedagang dalam kebijakan pembangunan fisik yang dalam konteks ini adalah pembangunan Kampung Seni Borobudur.

##### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dinamika partisipasi pedagang dalam suatu kebijakan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pedagang untuk tetap menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan dan penataan Kawasan Borobudur, khususnya dalam pemanfaatan hasil pembangunan Kampung Seni Borobudur.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Penelitian Terdahulu**

#### 1) Penelitian oleh Arrahmah & Wicaksono (2022)

Arrahmah & Wicaksono (2022) melakukan penelitian terdahulu yang berjudul "Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Ekowisata Hutan Mangrove Wana Tirta di Kabupaten Kulon Progo". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika partisipasi masyarakat dalam tata kelola ekowisata dengan menggunakan 3 (tiga) metode tahapan atau fase perkembangan wisata, yaitu fase *discovery*, fase *local response and initiative* serta fase *institutionalization*. Penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan ekowisata serta faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan tersebut.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata hutan mangrove Wana Tirta di Kabupaten Kulon Progo belum optimal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari pengelola tentang pembangunan berkelanjutan serta belum adanya strategi dan perencanaan pembangunan yang matang. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata Wana Tirta juga sangatlah minim. Berbagai permasalahan tersebut juga diperparah dengan tidak adanya keberlanjutan kedatangan wisatawan yang mengakibatkan minimnya pemasukan untuk mengembangkan fasilitas, sarana dan prasarana di Kawasan Ekowisata Wana Tirta.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arrahmah & Wicaksono (2022). Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada topik, metode penelitian serta arah tujuan suatu program atau kebijakan. Topik penelitian ini memiliki kesamaan dengan topik penelitian tersebut yang membahas tentang dinamika partisipasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan metode dalam penelitian tersebut, yaitu kualitatif deskriptif. Persamaan lain antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terkait dengan arah tujuan program atau kebijakan, yaitu untuk mewujudkan kebijakan pembangunan yang menekankan prinsip keberkelanjutan.

Penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian, penelitian tersebut memiliki fokus pada dinamika partisipasi yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata, sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika partisipasi yang terjadi dalam proses kebijakan publik. Penelitian ini juga memiliki lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Kampung Seni Borobudur, sedangkan penelitian tersebut dilaksanakan di Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Wana Tirta. Perbedaan lainnya terletak pada subjek penelitian, penelitian tersebut memiliki subjek penelitian yang terdiri dari masyarakat lokal dan kelompok Wana Tirta, sedangkan penelitian ini menjadikan pedagang kecil di Kampung Seni Borobudur, PT TWC/IDM, Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, Pemerintah Kecamatan Borobudur serta Pemerintah Desa Borobudur sebagai subjek penelitian. Berdasarkan beberapa perbedaan tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa penelitian terdahulu menekankan penggalian informasi dari subjek penelitian yang lebih luas untuk menganalisis dinamika partisipasi yang terjadi, sedangkan penelitian ini menekankan penggalian informasi dari subjek penelitian yang lebih fokus pada dinamika partisipasi pedagang dalam proses kebijakan publik.

## 2) Penelitian oleh Nelly (2024)

Nelly (2024) melakukan penelitian terdahulu yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik". Penelitian tersebut bertujuan untuk menggali berbagai bentuk partisipasi masyarakat, mengkaji hambatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta memberikan pemahaman mengenai perkembangan partisipasi yang dinamis dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di Indonesia merupakan fenomena yang dinamis, bervariasi, dan kompleks. Hasil yang lebih spesifik dari penelitian tersebut terdiri dari berbagai hal, yaitu beragamnya tingkat partisipasi, dinamika cara berpartisipasi melalui teknologi, urgensi dan hambatan partisipasi yang harus diatasi oleh pemangku kepentingan, pentingnya kualitas partisipasi serta tantangan kebijakan publik yang semakin kompleks.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian tentang partisipasi, metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif serta fakta tentang partisipasi dalam proses kebijakan

publik sebagai fenomena yang dinamis. Penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian tersebut. Perbedaan tersebut meliputi subjek penelitian serta lingkup permasalahan yang diteliti. Penelitian tersebut menggunakan fokus kajian literatur yang membuat subjek penelitian tersebut berupa literatur atau pustaka, sedangkan subjek penelitian ini adalah pedagang kecil yang direlokasi ke Kampung Seni Borobudur, PT/TWC, Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, Pemerintah Kecamatan Borobudur serta Pemerintah Desa Borobudur. Perbedaan lainnya terletak pada lingkup permasalahan yang diteliti, penelitian tersebut membahas permasalahan yang tidak terlalu spesifik yaitu mengenai fenomena partisipasi masyarakat yang dinamis dalam proses pembuatan kebijakan publik, sedangkan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini jauh lebih spesifik yaitu mengenai dinamika partisipasi pedagang kecil dalam kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur.

### 3) Penelitian oleh Heremba, Lambali & Hasniati (2022)

Heremba, Lambali & Hasniati (2022) melakukan penelitian terdahulu yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan". Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung di Distrik Ngguti. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di wilayah Distrik Ngguti dalam proses perencanaan pembangunan kampung belum optimal. Hal tersebut terjadi karena rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi skala prioritas pembangunan, ketidakpuasan masyarakat kampung

terhadap pemerintah serta masyarakat kampung sedikit apatis terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian tentang partisipasi, metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif serta pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Penelitian tersebut juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut meliputi lokasi penelitian serta subjek penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung di Distrik Ngguti, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kampung Seni Borobudur. Perbedaan lainnya meliputi subjek penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah pedagang kecil yang saat ini menempati Kampung Seni Borobudur dan pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan tersebut (PT TWC/IDM, Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, Pemerintah Kecamatan Borobudur serta Pemerintah Desa Borobudur), sedangkan subjek pada penelitian tersebut adalah masyarakat di Distrik Ngguti.

#### 4) Penelitian oleh Arnelly Rosiana (2017)

Arnelly Rosiana (2017) melakukan penelitian terdahulu yang berjudul "Partisipasi Pedagang dalam Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus: Pasar Karangayu Kota Semarang)". Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis sejauh mana partisipasi pedagang dalam perencanaan dan penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Semarang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pedagang merupakan hal

penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan program revitalisasi pasar tradisional. Pada kenyataannya, pola kerjasama antara Dinas Pasar, Pengelola Pasar dan Pedagang menunjukkan bahwa proses revitalisasi pasar tradisional belum berjalan cukup baik karena tidak adanya dukungan yang pasti dari masyarakat sekitar, meskipun pedagang berpartisipasi aktif.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arnelly Rosiana (2017). Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut berkaitan dengan topik partisipasi pedagang dalam sebuah kebijakan yang terkait dengan pasar, yaitu revitalisasi pasar. Persamaan lainnya terletak pada beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini, yaitu teori partisipasi masyarakat dalam pemerintahan atau kebijakan pemerintah.

Penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian tersebut. Perbedaan mendasar terletak pada aspek dukungan masyarakat sekitar, penelitian tersebut menempatkan faktor dukungan masyarakat sekitar pasar sebagai hal yang krusial selain partisipasi pedagang. Adapun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika partisipasi pedagang dalam suatu kebijakan publik serta tidak menyoroti faktor dukungan masyarakat lokal.

### **1.5.2. Kebijakan Pembangunan Pasar Wisata**

Kebijakan pembangunan pasar wisata dapat ditinjau dari konsep pasar wisata sebagai penunjang kegiatan wisata di suatu obyek wisata. Pasar wisata pada dasarnya merupakan tempat jual beli barang ataupun jasa yang bersifat rekreatif (Salamah dalam Cendrawasih, 2020: 39). Pasar wisata bersifat rekreatif karena interaksi yang terjadi antara wisatawan dengan pedagang tidak hanya sebatas

aktivitas jual beli, tetapi juga meliputi kegiatan rekreasi untuk menambah pengetahuan mengenai produk dan budaya lokal. Konsep tersebut menegaskan peranan pasar wisata sebagai penunjang kegiatan dan industri pariwisata di suatu obyek wisata.

Pasar wisata juga dapat didefinisikan sebagai pasar yang dilengkapi oleh fasilitas dan layanan yang berdampingan dengan kegiatan wisata serta didukung oleh daya beli produk khas di suatu daerah (Meiluna & Amiany, 2023: 14). Berdasarkan hal tersebut, pasar wisata dapat menjadi wadah untuk meningkatkan nilai ekonomi produk khas dari daerah tempat obyek wisata tersebut. Peranan pasar wisata dalam meningkatkan nilai ekonomis produk khas suatu daerah akan membawa implikasi tersendiri. Implikasi tersebut antara lain adalah pasar wisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong pembangunan ekonomi dan sumber pendapatan daerah.

Implikasi pasar wisata terhadap berbagai aspek tersebut menyebabkan pembangunan pasar wisata menjadi hal yang krusial. Pembangunan pasar wisata tersebut dilaksanakan melalui proses penataan. Adapun, penataan merupakan proses perencanaan untuk meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan yang dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata (Badudu & Zein dalam Rahmawati *et al.*, 2023: 20). Penataan pasar wisata merupakan upaya pemerintah dan seluruh stakeholder terkait untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban dan keamanan pasar wisata. Penataan pasar wisata dilaksanakan melalui penataan pedagang, pembagian area berdasarkan zonasi serta memaksimalkan fungsi kegiatan perdagangan, promosi dan rekreasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat



disimpulkan jika penataan pasar wisata merupakan hal krusial untuk mewujudkan pembangunan pasar wisata yang menekankan keteraturan dan ketertiban .

Pembangunan pasar wisata pada dasarnya merupakan proses, cara atau perbuatan membangun pasar yang selaras dan berdampingan dengan kegiatan wisata. Pembangunan pada dasarnya terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dapat dilihat wujudnya, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang bersumber dari dorongan masyarakat dan dalam jangka waktu yang panjang (Kuncoro dalam Latif *et al.*, 2020: 34). Pembangunan pasar wisata dapat dikategorikan sebagai pembangunan fisik yang dilaksanakan untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha pedagang, menyediakan fasilitas berbelanja yang memadai untuk wisatawan serta sebagai infrastruktur penunjang pariwisata.

Pembangunan pasar wisata yang dikategorikan sebagai pembangunan fisik merupakan realisasi dari pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik merupakan wujud nyata pembangunan non fisik yang meliputi aspek sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya serta diwujudkan dalam pembangunan sarana dan prasarana (Petri, 2021: 40). Pada dasarnya, aspek-aspek pembangunan non-fisik tersebut meliputi potensi dan permasalahan yang dapat dipecahkan dengan upaya konkret melalui pembangunan fisik. Oleh karena itu, pembangunan pasar wisata dapat dipahami sebagai wujud nyata dari realisasi pembangunan non-fisik yang didorong oleh permasalahan dan potensi dalam aspek sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, lingkungan ataupun pengembangan pariwisata.

Konsep pembangunan pasar wisata merupakan bagian dari kebijakan publik untuk memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Dye (dalam Maulana & Nugroho, 2019: 2), kebijakan publik adalah “*whatever government choose to do or not to do*” atau pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan. Dunn (dalam Maulana & Nugroho, 2019: 3) memperkuat pendapat tersebut dengan menyatakan kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan guna menjawab tantangan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan publik dapat diartikan sebagai pilihan tindakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan, memaksimalkan potensi serta mencapai tujuan.

Kebijakan publik dalam konteks pembangunan pasar wisata merupakan pilihan tindakan oleh pemerintah untuk menata dan membangun area kegiatan usaha pedagang di suatu obyek wisata. Kebijakan pembangunan pasar wisata juga dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana berupa pasar yang bersifat rekreatif serta selaras dengan kepentingan penataan obyek wisata. Adapun, pembangunan pasar wisata tersebut dilaksanakan dengan cara memperbesar manfaat serta mengurangi dampak kebijakan yang tidak diinginkan (Tobing & Weya, 2022: 38).

Upaya memperbesar manfaat pembangunan pasar wisata diharapkan dapat dirasakan langsung oleh wisatawan maupun pedagang. Manfaat yang diperoleh wisatawan meliputi kesenangan dalam berekreasi, meningkatnya pengetahuan mengenai produk yang dijual serta meningkatkan pemahaman mengenai budaya lokal melalui interaksi dengan pedagang. Adapun, manfaat yang diperoleh

pedagang adalah adanya lapangan pekerjaan baru, menambah pemasukan dan pendapatan pedagang serta menaikkan taraf hidup pedagang.

Upaya memperbesar manfaat yang dirasakan oleh pedagang dan wisatawan dilaksanakan melalui proses atau tahapan pembangunan pasar wisata. Pembangunan pasar wisata dapat dipengaruhi oleh partisipasi publik, yang menyebabkan beberapa tahapan pembangunan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat serta evaluasi. Menurut Cohen & Uphoff (dalam Azizah *et al.*, 2024: 601), tahap-tahap pembangunan ditinjau dari bentuk partisipasi masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Tahap Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi (Amalia & Ali, 2023: 66). Pengambilan keputusan dalam tahapan pembangunan berkaitan dengan penentuan alternatif yang didahului oleh perencanaan pembangunan tersebut. Tahap pengambilan keputusan dalam konteks pasar wisata merupakan hal yang krusial dan fundamental dalam menentukan arah dan orientasi pembangunan pasar wisata.

#### 2) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam kebijakan dimaknai sebagai aksi, aktivitas, mekanisme serta tindakan yang terencana dan dilakukan dengan mengacu pada norma atau aturan untuk mencapai tujuan yang disepakati (Afandi & Warijo dalam Desrinelti *et al.*, 2021: 84). Tahap pelaksanaan dalam proses pembangunan merupakan implementasi dari perencanaan dan pengambilan keputusan. Tahap pelaksanaan

pembangunan dalam konteks pasar wisata berkaitan dengan kegiatan dan tindakan pembangunan pasar wisata sesuai dengan perencanaan dan pengambilan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya.

### 3) Tahap Pengambilan Manfaat

Tahap pengambilan manfaat tidak terlepas dari kuantitas dan kualitas hasil pembangunan. Aspek kuantitas hasil pembangunan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan aspek kualitas hasil pembangunan dilihat dari kesesuaian hasil pembangunan dengan target yang ditetapkan. Tahap pengambilan manfaat juga berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan hasil yang diperoleh atas kegiatan yang dijalankan (Amalia & Ilyas, 2024: 17770). Tahap pengambilan manfaat pembangunan dalam konteks pasar wisata erat kaitannya dengan pemanfaatan hasil pembangunan pasar wisata oleh berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan pasar wisata, khususnya pedagang kecil.

### 4) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan proses penilaian tentang apa yang baik dan apa yang diharapkan (Diana *et al.*, 2023: 159). Penilaian tersebut berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan dan hasil suatu hal, khususnya dalam hal pembangunan. Tahap evaluasi dalam proses pembangunan meliputi kesesuaian rencana dengan hasil pembangunan serta mengkaji permasalahan pembangunan secara menyeluruh. Tahap evaluasi pembangunan dalam konteks pasar wisata bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan, permasalahan serta mengatasi dampak pembangunan pasar wisata.

### 1.5.3. Dinamika Partisipasi Pedagang dalam Pembangunan Pasar Wisata

Istilah dinamika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu; “*dynamics*” yang berarti kekuatan. Definisi dinamika dapat diketahui lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu gerak (dari dalam), tenaga yang menggerakkan, atau semangat. Oleh karena itu, dinamika dapat dimaknai sebagai kekuatan yang merepresentasikan suatu kondisi yang selalu bergerak, berubah, dan menyesuaikan lingkungan (Widyanti dalam Rivenka *et al.*, 2023 :85).

Kadarisman *et al.* (2021: 142) menambahkan bahwa perubahan sebagai akibat dari dinamika terjadi secara cepat atau lambat, besar atau kecil serta relevan dengan kehidupan. Proses perubahan tersebut terjadi dalam berbagai aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antara individu, kelompok ataupun lingkungan. Salah satu aspek yang dapat mengalami perubahan atau dinamika adalah partisipasi dalam suatu kebijakan publik.

Istilah partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta. Cohen & Uphoff (dalam Hutagalung, 2022: 10) memperjelas definisi partisipasi tersebut dengan mengemukakan pendapatnya bahwa partisipasi adalah keterlibatan dalam suatu program atau kebijakan untuk mencapai tujuan melalui proses pembuatan keputusan, implementasi, memperoleh kebermanfaatan dan evaluasi. Pada intinya, partisipasi merupakan keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam suatu program atau kebijakan serta menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan ketepatan suatu program atau kebijakan (Puspita *et al.*, 2023: 1)

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika partisipasi merujuk pada perubahan partisipasi yang terjadi pada setiap tahapan kebijakan. Pada dasarnya, partisipasi individu atau kelompok masyarakat pada tahapan kebijakan dapat mengalami perubahan bentuk, intensitas, skala, motivasi serta akses partisipasi. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan partisipasi dapat berjalan aktif pada suatu waktu, tetapi juga dapat berjalan pasif di waktu lain. Oleh karena itu, dinamika partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif ataupun partisipasi pasif (Suswantoro dalam Romeon & Sukmawati, 2021: 2).

Individu atau kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan ataupun kebijakan ditandai dengan keterlibatan langsung. Keterlibatan langsung dalam konteks ini meliputi partisipasi secara fisik, mental maupun emosi dalam setiap kegiatan dan kebijakan yang dilakukan (Untarti & Kusuma dalam Prasetyo *et al.*, 2021: 144). Pada dasarnya, partisipasi aktif dalam suatu kegiatan ataupun kebijakan dilaksanakan melalui pengajuan usul, alternatif, saran serta kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah.

Partisipasi individu atau kelompok masyarakat tidak hanya bersifat aktif, tetapi juga dapat bersifat pasif. Partisipasi pasif merupakan kondisi dimana individu atau kelompok masyarakat hanya sebatas menaati, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah (Surbakti dalam Saiin, 2020: 135). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi pasif merupakan partisipasi yang hanya berorientasi pada proses *output* atau hasil, tanpa keterlibatan langsung dalam tahapan kegiatan ataupun kebijakan.

Dinamika partisipasi dalam konteks partisipasi aktif ataupun pasif dapat terjadi dalam berbagai kebijakan publik, khususnya kebijakan pembangunan pasar wisata. Dinamika partisipasi dalam kebijakan pembangunan pasar wisata terkait dengan partisipasi pedagang kecil sebagai kelompok sasaran dan pihak yang berpartisipasi pada kebijakan tersebut. Pedagang kecil dalam konteks ini dimaknai sebagai pedagang yang berjualan dengan keuntungan yang minim dan keuntungan tersebut digunakan untuk bertahan hidup (Halpiah *et al.*, 2021: 140). Berdasarkan hal tersebut, dinamika partisipasi pedagang kecil dalam kebijakan pembangunan pasar wisata dapat diartikan sebagai perubahan, perkembangan dan interaksi yang terjadi dalam partisipasi pedagang kecil pada setiap tahapan kebijakan tersebut.

Dinamika partisipasi dalam kebijakan pembangunan pasar wisata terkait dengan aktif atau pasifnya pedagang kecil dalam kebijakan tersebut. Aktif atau pasifnya pedagang kecil tersebut ditandai dengan beberapa indikator partisipasi. Indikator partisipasi bermanfaat untuk mengukur partisipasi masyarakat yang pada konteks ini adalah para pedagang dalam berbagai kegiatan ataupun tahapan kebijakan. Oakley (dalam Ma'mun *et al.*, 2023: 1355) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam sebuah kebijakan dapat ditinjau dari 5 (lima) indikator, yaitu kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat, peran dan aksi masyarakat, motivasi masyarakat dan tanggung jawab masyarakat. Beberapa indikator partisipasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kontribusi Masyarakat, yaitu indikator partisipasi yang dimaknai sebagai keterlibatan atau sumbangsih masyarakat melalui pemikiran, tenaga, dana ataupun fasilitas penunjang kebijakan dan program yang dijalankan. Menurut

Pratiwi (dalam Ma'mun *et al.*, 2023: 1356), kontribusi pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh status individu serta dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Kontribusi dapat dilakukan ketika individu atau kelompok masyarakat menyadari bahwa dukungannya dibutuhkan oleh pihak terkait. Indikasi kontribusi masyarakat dalam konteks partisipasi pedagang kecil berkaitan dengan sumbangsih yang diberikan untuk mendukung kebijakan pembangunan pasar wisata.

- 2) Pengorganisasian Masyarakat, yaitu indikator partisipasi yang meliputi proses pembagian kerja atau struktur kelembagaan. Menurut Mulyani (dalam Ma'mun *et al.*, 2023: 1356), indikator partisipasi dalam konteks organisasi dilihat sebagai sarana berpartisipasi melalui struktur kelembagaan yang terbentuk oleh masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi dalam konteks pengorganisasian masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskan kebijakan, program atau pembangunan dengan menyusun pengorganisasian sehingga kebijakan ataupun program pembangunan tersebut dapat berjalan dengan terstruktur. Indikator pengorganisasian masyarakat dalam konteks partisipasi pedagang kecil berkaitan dengan pedagang yang telah terorganisasi sehingga telah mengetahui peran dan tugasnya dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan di pasar wisata.
- 3) Peran dan Aksi Masyarakat, yaitu indikator partisipasi yang merujuk pada tugas, fungsi, kewajiban dan tindakan nyata masyarakat dalam tahapan kebijakan untuk mewujudkan tujuan bersama. Menurut Fauziyah (dalam Ma'mun *et al.*, 2023: 1357), peran dan aksi masyarakat dalam program atau



pembangunan sangat dibutuhkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi, pemilihan dan pengambilan keputusan untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah serta pengevaluasian perubahan yang terjadi. Indikator peran dan aksi masyarakat dalam konteks partisipasi pedagang kecil berkaitan dengan tugas, fungsi, kewajiban dan wujud nyata keterlibatan pedagang kecil pada tahapan pembangunan pasar wisata.

- 4) Motivasi Masyarakat, yaitu indikator partisipasi yang merujuk pada penggunaan partisipasi untuk memotivasi orang-orang agar menyumbangkan kemampuannya kepada kelompok sehingga daya pikir dan inisiatifnya dapat muncul serta diarahkan untuk tujuan kelompok. Indikator motivasi masyarakat dalam konteks partisipasi pedagang kecil berkaitan dengan motivasi yang mendorong semangat pedagang kecil untuk terlibat dalam kebijakan dan program pembangunan pasar wisata.
- 5) Tanggung Jawab Masyarakat, yaitu indikator partisipasi yang merujuk pada perilaku yang aktif dan tekun dalam melaksanakan kebijakan serta bersedia menanggung segala resiko yang terjadi. Tanggung jawab masyarakat juga mencakup kesadaran akan kepentingan bersama, kontribusi positif, dan dukungan terhadap upaya untuk mencapai tujuan bersama. Indikator tanggung jawab masyarakat dalam konteks partisipasi pedagang kecil berkaitan dengan kemampuan berpartisipasi pedagang kecil pada kebijakan pembangunan pasar wisata serta kesediaan untuk menanggung segala resiko dari partisipasinya dalam kebijakan tersebut.

Beberapa indikator tersebut berfungsi sebagai acuan untuk mewujudkan target partisipasi serta dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Beberapa faktor tersebut dapat menjadikan partisipasi berjalan aktif dan pasif atau berjalan dinamis dan mengalami dinamika. Widiana (2022: 139) dalam penelitiannya menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut Plumer (dalam Widiana, 2022: 140), beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, kepercayaan terhadap budaya tertentu serta jumlah penghasilan. Adapun, beberapa faktor internal yang mempengaruhi partisipasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pengetahuan dan keahlian

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan memengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada (Kamalah *et al.*, 2023: 134). Dengan memiliki dasar pengetahuan yang memadai, masing-masing individu dalam suatu masyarakat dapat memahami tahapan dan bentuk partisipasi yang akan mereka lakukan dalam suatu kegiatan ataupun kebijakan.

b) Pekerjaan masyarakat

Menurut Kamalah *et al.* (2023: 134), biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Sering kali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi. Dengan demikian, seseorang dalam suatu masyarakat yang memiliki komitmen dan intensitas pekerjaan yang tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi yang rendah.

c) Tingkat pendidikan dan buta huruf

Faktor ini sangat berpengaruh terhadap keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada (Kamalah *et al.*, 2023: 134). Dalam konteks ini, semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang, maka pengetahuan mengenai bentuk dan cara berpartisipasi juga semakin luas (Yanti *et al.*, 2019: 434). Oleh karena itu, pendidikan merupakan faktor yang sangat penting guna memudahkan partisipasi seseorang dalam masyarakat.

d) Jenis kelamin

Menurut Kamalah *et al.* (2023: 134), faktor inilah yang sangat memengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi karena adanya anggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan. Menurut Yanti *et al.* (2019: 434), perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya sistem

pelapisan sosial dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang berkembang dan bertahan dalam kultur masyarakat yang membuat peranan perempuan hanya sekadar mengurus rumah tangga dan tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangannya terhadap suatu permasalahan. Dengan demikian, perbedaan jenis kelamin dapat memengaruhi bentuk dan intensitas partisipasi dalam suatu kegiatan ataupun kebijakan.

e) Kepercayaan terhadap budaya tertentu

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada. Meskipun begitu, kepercayaan yang dianut dapat memengaruhi tingkat partisipasi seseorang dalam masyarakat. Hal ini karena kepercayaan yang dianut oleh seseorang dapat menentukan sikap dan perilaku mereka terhadap suatu program (Kamalah *et al.*, 2023: 137).

f) Jumlah penghasilan

Jumlah penghasilan merupakan faktor internal yang berkaitan dengan pengaruh tingkat penghasilan terhadap partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan ataupun kebijakan. Menurut Yanti *et al.* (2019: 438), penghasilan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Dengan demikian, untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, maka harus didukung oleh suasana perekonomian yang mapan.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan “segala faktor yang berasal dari luar atau segala pengaruh yang berasal dari luar” (Koswara & Adisel, 2022: 33). Menurut Sunarti (dalam Widiana, 2022: 140), beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi meliputi intensitas sosialisasi, kapasitas dan kapabilitas pemimpin, keaktifan fasilitator serta pengaruh masyarakat dari luar. Adapun, beberapa faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Intensitas sosialisasi, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat karena intensitas sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang partisipasi. Dalam konteks kebijakan ataupun pembangunan, sosialisasi aktif pemerintah akan berkorelasi terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai urgensi partisipasi dalam pembangunan;
- b) Kapasitas dan kapabilitas pemimpin, yaitu faktor eksternal yang berkaitan dengan figur tokoh dan pemimpin yang perannya sangat sentral dalam mempengaruhi partisipasi. Kapasitas dan kapabilitas pemimpin dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat karena figur tokoh dan pemimpin saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat;
- c) Keaktifan fasilitator, yaitu faktor eksternal yang berkaitan dengan pengaruh fasilitator dalam pendampingan program partisipasi. Pada dasarnya fasilitator dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat karena fasilitator sangat

dibutuhkan dalam pendampingan berbagai program, khususnya program partisipasi masyarakat;

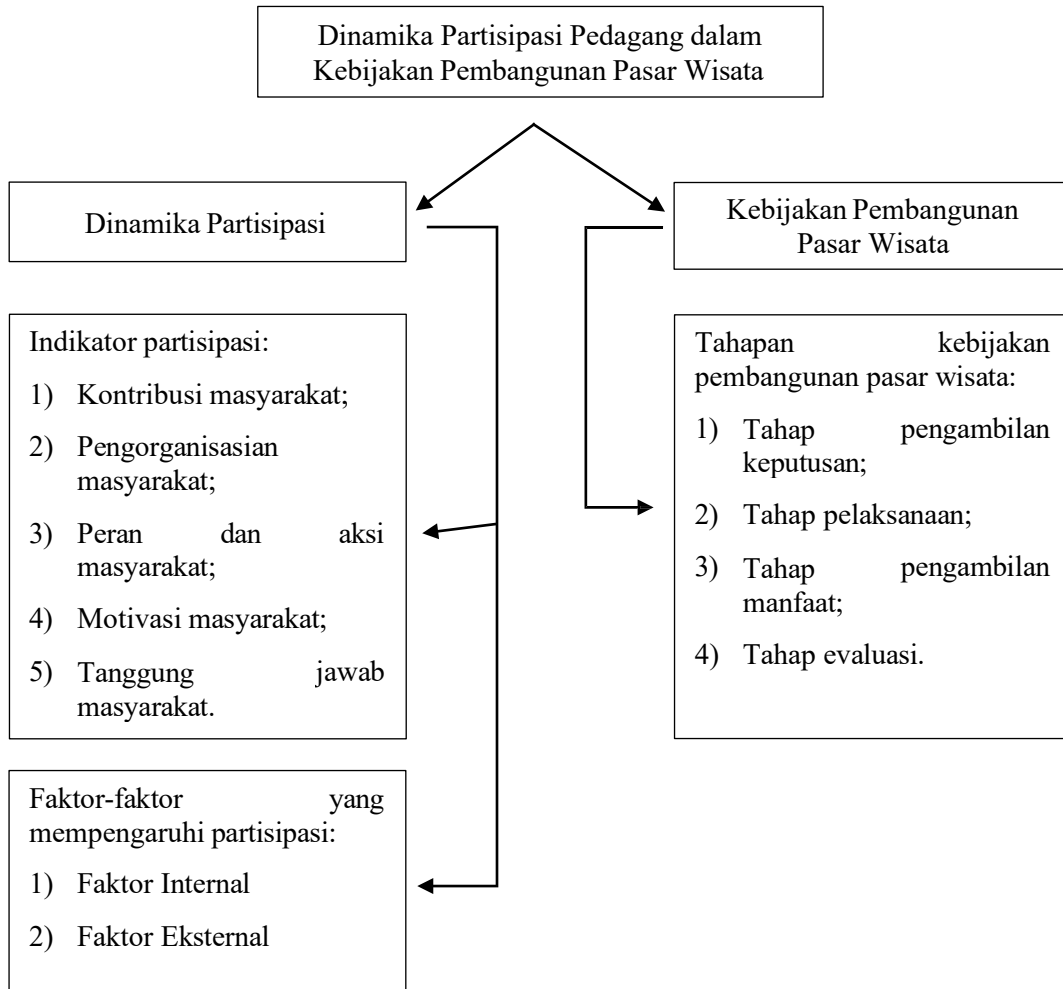
- d) Pengaruh masyarakat dari luar, yaitu faktor eksternal yang berkaitan dengan pengaruh masyarakat dari luar dalam mempengaruhi partisipasi karena kemudahan terhubung satu dengan yang lain. Pada era modernisasi dan keterbukaan, masyarakat akan semakin mudah terhubung dan mendapatkan pengaruh dari masyarakat luar. Oleh karena itu, partisipasi seseorang dapat dipengaruhi oleh masyarakat dari luar karena disebabkan oleh perkembangan era atau zaman tersebut.

Berdasarkan berbagai aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika partisipasi dalam pembangunan pasar wisata merujuk pada perubahan partisipasi yang dilakukan oleh pedagang kecil dalam tahapan kebijakan pembangunan pasar wisata. Pedagang kecil sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pembangunan tersebut dapat berpartisipasi ataupun tidak berpartisipasi yang akan memengaruhi proses dan hasil pembangunan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi pedagang kecil ditujukan untuk memastikan proses dan hasil pembangunan sesuai dengan keinginan, tujuan dan memberikan manfaat.

### **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Menurut Simanjuntak (2023), operasionalisasi konsep merupakan variabel yang menjadi titik fokus penelitian serta memiliki sifat yang rinci, tegas, spesifik dan pasti. Sifat-sifat tersebut berguna dalam menggambarkan variabel penelitian yang penting serta menghindari kesalahan dalam penafsiran ataupun penelaahan. Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Operasional Penelitian**



Keterangan:

- 1) Dinamika partisipasi pedagang dalam kebijakan pembangunan pasar wisata merujuk pada perubahan partisipasi pedagang kecil dalam tahapan kebijakan tersebut. Perubahan partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan yang menyangkut aktif atau pasifnya pedagang kecil dalam tahapan kebijakan tersebut. Perubahan tersebut dapat diketahui dari perubahan bentuk, intensitas, skala, motivasi serta akses partisipasi.
- 2) Dinamika partisipasi pada penelitian ini merupakan bagian dari konsep dinamika partisipasi dalam kebijakan pembangunan pasar wisata. Dinamika partisipasi merupakan suatu kondisi yang mana partisipasi berjalan secara dinamis atau mengalami perubahan. Perubahan tersebut menyebabkan partisipasi dapat berjalan aktif pada suatu waktu, tetapi juga dapat berjalan pasif di waktu lain. Adapun, dinamika partisipasi dapat ditinjau dari segi indikator dan faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a) Indikator partisipasi
    - Kontribusi masyarakat, yaitu indikator partisipasi yang dalam penelitian ini merujuk pada sumbangsih yang diberikan pedagang kecil untuk mendukung kebijakan pembangunan pasar wisata;
    - Pengorganisasian masyarakat, yaitu indikator partisipasi yang dalam penelitian ini merujuk pada keikutsertaan pedagang kecil dalam menyukseskan kebijakan, program atau pembangunan dengan menyusun pengorganisasian sehingga kebijakan ataupun program



pembangunan tersebut dapat berjalan dengan terstruktur;

- Peran dan aksi masyarakat, yaitu indikator partisipasi yang dalam penelitian ini berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewajiban pedagang kecil pada tahapan pembangunan pasar wisata;
- Motivasi masyarakat, yaitu indikator partisipasi yang dalam penelitian ini merujuk pada penggunaan partisipasi untuk memotivasi pedagang kecil agar menyumbangkan kemampuannya kepada kepentingan bersama sehingga daya pikir dan inisiatifnya dapat muncul serta diarahkan untuk tujuan bersama;
- Tanggung jawab masyarakat, yaitu indikator partisipasi yang dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan berpartisipasi pedagang kecil pada kebijakan pembangunan pasar wisata serta kesediaan untuk menanggung segala resiko dari kebijakan tersebut.

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

- Faktor internal, yaitu faktor yang dalam penelitian ini meliputi pengaruh dari dalam diri pedagang kecil yang dapat mempengaruhi pedagang kecil tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kebijakan. Menurut Plumer (dalam Widiana, 2022: 140), beberapa faktor internal yang mempengaruhi partisipasi adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, kepercayaan terhadap budaya tertentu serta jumlah penghasilan;
- Faktor eksternal, yaitu faktor yang dalam penelitian ini terkait dengan segala faktor ataupun pengaruh dari luar diri pedagang kecil yang dapat

mempengaruhi kecenderungan berpartisipasi pedagang kecil tersebut dalam suatu kebijakan. Menurut Sunarti (dalam Widiana, 2022: 140), beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi meliputi intensitas sosialisasi, kapasitas dan kapabilitas pemimpin, keaktifan fasilitator serta pengaruh masyarakat dari luar.

3) Kebijakan pembangunan pasar wisata merupakan pilihan tindakan oleh pemerintah untuk menata dan membangun area kegiatan usaha pedagang di suatu obyek wisata. Kebijakan pembangunan pasar wisata juga dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana berupa pasar yang bersifat rekreatif serta selaras dengan kepentingan penataan obyek wisata. Pada dasarnya, untuk menata dan membangun pasar wisata memerlukan beberapa tahapan, yaitu tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap pengambilan manfaat dan tahap evaluasi. Menurut Cohen & Uphoff (dalam Azizah *et al.*, 2024: 601), beberapa tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Tahap pengambilan keputusan, yaitu tahapan pembangunan yang pada konteks penelitian ini berkaitan dengan penentuan alternatif yang didahului oleh perencanaan dalam pembangunan tersebut;
- b) Tahap pelaksanaan, yaitu tahapan pembangunan yang pada konteks penelitian ini berkaitan dengan kegiatan dan tindakan pembangunan pasar wisata sesuai dengan perencanaan dan pengambilan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya;

- c) Tahap pengambilan manfaat, yaitu tahapan pembangunan yang pada konteks penelitian ini berkaitan dengan pemanfaatan hasil pembangunan pasar wisata oleh berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan pasar wisata, khususnya pedagang kecil;
- d) Tahap evaluasi, yaitu tahapan pembangunan yang pada konteks penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan, permasalahan yang dihadapi serta langkah yang harus dilakukan untuk memaksimalkan dampak pembangunan pasar wisata.

### **1.7. Argumen Penelitian**

Argumen dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Partisipasi pedagang kecil dalam kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur mengalami dinamika pada proses pembangunannya;
- 2) Partisipasi pedagang kecil dalam kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur dipengaruhi oleh sejumlah faktor;

### **1.8. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara sistematis untuk mendapatkan dan menganalisa suatu fakta dari suatu peristiwa. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertipe deskriptif. Peneliti menggunakan metode tersebut karena tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai suatu peristiwa. Oleh karena itu, peneliti dapat memperoleh data yang mendalam untuk menganalisa dinamika partisipasi pedagang kecil dalam kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur.

### 1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian sebagai upaya pencarian dan penganalisisan data untuk mencari fakta tentunya memiliki beberapa tipe atau kategori khusus. Adapun, tipe-tipe penelitian meliputi penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatif. Menurut Rahmadi (2011: 59), tipe-tipe penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penelitian Eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan menggali dan mengeksplorasi informasi baru tentang suatu topik atau fenomena yang belum diketahui;
- 2) Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau karakteristik populasi yang sedang diteliti oleh peneliti secara lebih detail;
- 3) Penelitian Eksplanatif/Eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi. Penelitian dengan tipe ini juga disebut sebagai penelitian sebab-akibat atau *causality research*.

Penelitian tentang dinamika partisipasi pedagang dalam kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur merupakan penelitian bertipe deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara obyektif dengan cara menekankan analisis dan interpretasi data yang sudah didapatkan oleh peneliti. Pada intinya, peneliti memilih menerapkan penelitian deskriptif karena ingin menggambarkan fenomena dinamika partisipasi pedagang dalam kebijakan tersebut serta keterlibatan dan peran berbagai *stakeholder* dalam mempengaruhi dinamika partisipasi yang terjadi.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilaksanakan di lokasi penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan memenuhi kebutuhan penelitian. Situs pada penelitian ini adalah Kampung Seni Borobudur, yang terletak di Jl. Medang Kamulan No.4, Kw. Candi Borobudur, Kujon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan ketepatan, kecukupan dan validitas data. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomena tersebut dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Adlini *et al.*, 2022: 976). Pada intinya, subjek penelitian berperan penting dalam membantu peneliti untuk memperoleh data dari fenomena secara lengkap. Subjek penelitian pada dasarnya adalah pihak yang memberikan informasi dan menjadi sampel pada penelitian. Adapun, subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Paguyuban Sentra Kerajinan dan Makanan Borobudur (SKMB) selaku perwakilan dari 330 pedagang yang belum mendapatkan hak atas kios di Kampung Seni Borobudur sebagai subjek utama;
- 2) 7 (tujuh) orang pedagang di Kampung Seni Borobudur yang sebelumnya menempati Zona 3 Kawasan Borobudur sebagai subjek utama;

- 3) Perwakilan dari Bagian *Operation* PT TWC atau IDM sebagai subjek pendukung;
- 4) Kepala Bagian Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang sebagai subjek pendukung;
- 5) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Borobudur sebagai subjek pendukung;
- 6) Sekretaris Desa Borobudur sebagai subjek pendukung.

#### **1.8.4. Jenis Data**

Data merupakan aspek yang sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Urgensi data dalam penelitian disebabkan oleh peranan data yang dapat memberikan gambaran situasi, peristiwa atau permasalahan yang akan diteliti. Adapun, jenis data merupakan kumpulan catatan dan pengamatan dari seorang informan yang berbentuk kata-kata atau angka. Data penelitian pada dasarnya akan dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa informan dan data tersebut akan diolah peneliti sehingga peneliti mendapatkan data secara tepat, akurat dan jelas. Pada penelitian ini penulis lebih menekankan penggunaan data kualitatif daripada data kuantitatif. Menurut Hardani *et al.* (2020: 246), kedua jenis data tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Data Kuantitatif**

Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan kuantitas. Data kuantitatif memiliki bentuk angka absolut atau *parametric* sehingga besarnya dapat ditentukan. Data kuantitatif pada dasarnya dapat dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

## 2) Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang orientasinya menunjukkan kualitas data yang dapat berbentuk angka *non parametric*. Pada dasarnya, data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata atau bukan dalam bentuk angka. Adapun, data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, diskusi, observasi ataupun analisa data.

### **1.8.5. Sumber Data**

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dijadikan rujukan informasi mengenai data. Pada dasarnya, sumber data dapat diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Riadi (dalam Sari & Zefri, 2019: 311), sumber data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti dari sumber pertama dan dikumpulkan secara langsung melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang memiliki orisinalitas atau tanpa perlakuan statistik tambahan. Pada dasarnya tujuan penggunaan data primer adalah untuk mengetahui realita sumber data di lapangan dan menganalisa untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian ini membutuhkan data primer yang berasal dari pedagang kecil di Kampung Seni Borobudur, PT TWC/IDM, Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, Pemerintah Kecamatan Borobudur serta Pemerintah Desa Borobudur. Data primer pada penelitian ini terdiri dari data potensi responden, data tentang dinamika partisipasi pedagang kecil di Kampung Seni Borobudur dalam kebijakan

pembangunan Kampung Seni Borobudur serta data tambahan yang berasal dari berbagai *stakeholder* yang terkait dengan fokus penelitian (PT TWC/IDM, Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, Pemerintah Kecamatan Borobudur serta Pemerintah Desa Borobudur). Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah wawancara mendalam dengan responden terpilih. Adapun, pertanyaan penelitian yang diajukan untuk responden meliputi bentuk dan dinamika partisipasi pedagang kecil dalam kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika partisipasi tersebut.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data sekunder dapat dijadikan sebagai kelengkapan sebelum pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan. Selain itu, data sekunder juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran tambahan atau gambaran yang dapat melengkapi data primer.

Penelitian ini ditunjang oleh data sekunder yang meliputi profil Kawasan Borobudur, data kependudukan, data pelaksanaan kebijakan dan lain-lain. Pada dasarnya data sekunder tersebut akan menambah pemahaman pembaca mengenai penelitian ini. Data sekunder yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini berasal dari buku, artikel jurnal, dokumen perundang-perundangan, dan sumber literatur lainnya.



### 1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan salah satu teknik dengan pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Data tersebut dapat berupa kata-kata atau gambar. Teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi terkait dinamika partisipasi pedagang kecil dalam kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur. Adapun, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Menurut Rahmadi (2011: 76), kemampuan peneliti untuk melakukan wawancara sangat berpengaruh dalam membuat wawancara berlangsung baik, efektif dan efisien. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki teknik dan etika ketika melakukan wawancara.
- 2) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Hasil dari teknik observasi adalah peristiwa, kondisi, obyek, suasana, dan aktivitas. Teknik observasi digunakan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tepat dari suatu kejadian untuk menjawab permasalahan penelitian.
- 3) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersumber dari buku, arsip, jurnal, laporan, dan dokumen. Data yang didapatkan harus berkorelasi dengan topik penelitian. Adapun, data-data tersebut digunakan sebagai bahan analisa permasalahan.

### 1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Strauss & Corbin (dalam Haryoko *et al.*, 2020: 268), tahapan analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tahapan *open coding*, yaitu tahapan analisis data yang meliputi penganalisisan data lapangan menjadi unit fenomena dan pemberian nama pada unit fenomena tersebut. Tahapan ini merupakan langkah awal dalam proses analisis penelitian kualitatif. Tahapan ini dilakukan dengan cara pemecahan data mentah ke dalam unit-unit kecil dengan melakukan kategorisasi pada suatu fenomena melalui pemeriksaan/pengujian data.
- 2) Tahapan *axial coding*, yaitu tahapan analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang sudah terbagi dalam unit fenomena menjadi beberapa kategori. Pengelompokkan data tersebut diawali dengan menyamakan fenomena dan mengelompokkan konsep-konsep yang berkaitan dengan fenomena itu untuk mengurangi jumlah unit data.
- 3) Tahap *selective coding*, yaitu tahapan pengembangan konsep yang memiliki ciri di setiap fenomena atas dasar sifat dan dimensinya kemudian mendefinisikannya. Pada tahap *selective coding*, sifat, ukuran luas serta keadaan dimensional merupakan hal yang penting dan dikembangkan secara sistematis. Hal tersebut menjadi dasar pembuatan hubungan antara kategori dan subkategori, hingga berkembang menjadi kategori-kategori pokok atau kategori utama. Oleh karena itu, pemahaman peneliti mengenai sifat, ukuran, dimensi dan hubungannya menjadi hal yang wajib dimiliki untuk mengembangkan teori dasar.

### **1.8.8. Kualitas Data (Goodness Criteria)**

Kualitas data (*goodness criteria*) dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Kredibilitas**

Kredibilitas merupakan salah satu kriteria dalam kualitas data atau *goodness criteria* yang meliputi kepercayaan terhadap hasil penelitian. Kriteria ini dapat dilihat dari perspektif informan dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu indikator dalam memilih informan yang dapat dipercaya untuk mewakili persepsi pedagang kecil terkait dinamika partisipasi pedagang dalam kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur. Selain itu peneliti juga memilih informan pendukung yang kredibel untuk menambah pemahaman mengenai dinamika partisipasi yang meliputi perwakilan Bagian *Operation* PT TWC/IDM, Kepala Bagian Pasar Disdagkop UKM, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Borobudur serta Sekretaris Desa Borobudur.

#### **2) Konfirmabilitas**

Konfirmabilitas merupakan salah satu kriteria dalam kualitas data atau *goodness criteria* yang meliputi tingkatan ketika hasil penelitian dapat dikonfirmasi dengan penelitian lain atau mencakup obyektivitas. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan konsep dan kerangka pemikiran yang jelas dan obyektif serta menyajikan penelitian terdahulu sebagai pembandingan. Penelitian pendahulu yang digunakan sebagai pembandingan berkaitan dengan dinamika partisipasi masyarakat terhadap suatu kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan fisik.

### 3) Otentisitas

Otentisitas merupakan salah satu kriteria dalam kualitas data atau *goodness criteria* yang meliputi hasil penelitian yang diharapkan menjadi refleksi otentik dari subyek informan. Penelitian ini menekankan pengambilan data dari subyek informan yang menggambarkan realita di lapangan serta tanpa adanya upaya peneliti untuk mengaburkan realita tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang otentik serta dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

-